

Awasi BOS

Untuk Pendidikan Yang Lebih Baik



Edisi I, Desember 2012

Dana BOS untuk Semua, Diawasi Bersama

**Pengawasan Masyarakat yang Semu
dalam Pengelolaan Program BOS**

Secercah Harapan di Gedung DPR

Sulitnya Memperoleh Data Tentang BOS



TAJUK

Tahun 2012 telah menginjak pada triwulan keempat dan sebentar lagi menuju akhir tahun. Biasanya saat ini adalah musim-musim ujian tengah semester atau jika tidak mulai persiapan untuk ujian akhir semester pada penghujung perhatian tahun. Bahkan bagi orang tua siswa sekolah dasar dan menengah, masa-masa ini sangatlah mengkhawatirkan. Kekhawatiran tersebut bukan karena kekhawatiran akan nilai akhir anak-anak mereka tetapi lebih karena biaya yang harus dibayarkan menjelang akhir semester, biaya ujian semester.

Hadirnya dana BOS diharapkan bisa mengurangi kepedihan tersebut dengan memberikan dana bantuan langsung ke sekolah. Terhitung sejak tahun 2012, dana BOS ditransfer langsung ke sekolah dan pengelolaannya tetap berada di bawah otoritas sekolah. Meski proses tersebut dianggap lebih baik daripada tahun sebelumnya, namun upaya terhadap penyelewengan masih dapat terjadi. Karena proses transfer langsung ke sekolah, dinas tidak dapat mengontrol proses pelaporan dari sekolah dari triwulan ke triwulan.

Melihat berbagai fenomena tersebut, YSKK sedang mengembangkan model pengawasan BOS berbasis komunitas. Sebagai salah satu upaya untuk mensosialisasikan proses program dalam mendorong akuntabilitas dana BOS, YSKK menerbitkan sebuah E-Magazine yang bertajuk 'Awasi BOS... ..

Selamat membaca

DAFTAR ISI

2 Tajuk
Daftar Isi
Tim Kerja

FOKUS

3

Dana BOS untuk Semua,
Diawasi Bersama

8

Kisah

5

Pengawasan Masyarakat yang
Semu dalam Pengelolaan
Program BOS

9

Kabar program

REDAKSI

Penanggungjawab	: Kangsure Suroto
Pimpinan Redaksi	: Ana Susi Yuniasri
Dewan Redaksi	: Amy Supadmi, Sri Eka Wati, FX. Agus Mulyono
Editor	: FX. Agus Mulyono
Alamat Redaksi	: Singopuran Rt.02/Rw.V No. 103, Kartasura, Surakarta 57164 Jawa Tengah – Jawa Tengah
Telp	: +62-271-700 3159
Fax.	: +62-271-781 724
e-Mail	: office@yskk.org
Homepage	: www.yskk.org

E-Magazine ini diterbitkan atas bantuan United States Agency for International Development (USAID). Isi E-Magazine ini sepenuhnya tanggungjawab YSKK dan tidak mencerminkan pandangan USAID atau Pemerintah Amerika Serikat



Dana BOS untuk Semua, Diawasi Bersama



Tingginya bantuan tersebut memungkinkan dana BOS cukup besar dikelola oleh tiap-tiap sekolah setiap tahunnya. “Bahkan beberapa sekolah yang cukup besar bisa mengelola anggaran dana BOS hingga 1 milyar rupiah per tahun dengan jumlah siswa lebih dari 800 anak,” lanjut suroto.

Besarannya tiap sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa. Sehingga sekolah yang memiliki siswa lebih banyak akan mendapatkan dana lebih besar. “Biaya operasional sekolah digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar,” ungkap Agus, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul di dalam Workshop Lanjutan Pengembangan Model Pengawasan Dana BOS yang Berbasis Masyarakat.

Optimalisasi penggunaan dana tersebut seharusnya dapat mengurangi beban biaya pendidikan yang ditanggung orang tua. Pengelolaan yang baik dapat mendorong efisiensi dan mungkin mencapai cita-cita sekolah gratis. Hal tersebut sangatlah memungkinkan mengingat Dana BOS tidak hanya turun dari tingkat nasional tetapi juga bisa berasal dari tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten.

“Di Kabupaten Gunungkidul dan sebagian Kabupaten/Kota di Yogyakarta juga memberlakukan dana BOS Provinsi dan BOSDA (BOS Daerah) dari kabupaten,” ungkap Suroto, Direktur Yayasan Satu Karsa Karya dalam kesempatan yang sama.

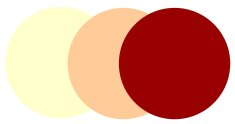
Tingginya bantuan tersebut memungkinkan dana BOS cukup besar dikelola oleh tiap-tiap sekolah setiap tahunnya. “Bahkan beberapa sekolah yang cukup besar bisa mengelola anggaran dana BOS hingga 1 milyar rupiah per tahun dengan jumlah siswa lebih dari 800 anak,” lanjut suroto.

Penyelewengan Dana BOS

Jumlah dana yang cukup besar juga berpotensi terjadi penyelewengan dalam penggunaannya. “Hasil assessment kami menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana BOS rentan penyelewengan,” ungkap Ana Susi, Program Manager Yayasan Satu Karsa Karya.

Pernyataan tersebut tidaklah berlebihan ketika merunut hasil laporan dari Indonesia Corruption Watch mengenai potensi penyelewengan Dana BOS. Format penyelewengan yang umum terjadi mulai dari pembelian bahan-bahan yang tidak relevan dan tidak mendukung kegiatan belajar mengajar. Kemudian berlanjut kepada potensi mark-up dalam pembelian barang dan jasa.

“Terjadiya penyelewengan dalam penggunaan Dana BOS seharusnya dimaknai sebagai upaya untuk mengambil hak untuk menikmati pendidikan dasar,” jelas Ana Susi. “Seharusnya dana yang diselewengkan tersebut dapat digunakan untuk membiayai satu atau dua anak lainnya untuk dapat menyelesaikan pendidikannya,” lanjutnya.



Agaknya asumsi tersebut dapat dibenarkan. Efisiensi penggunaan anggaran Dana BOS berarti upaya untuk memperluas jumlah siswa yang akan mendapatkan manfaat dari penggunaan bantuan tersebut. Sehingga ketika terjadi penyelewengan jumlah siswa yang mendapatkan bantuan akan semakin berkurang. Dan mungkin terpaksa untuk tidak melanjutkan pendidikan dasar. Menyepakati asumsi tersebut, penyelewengan dana BOS seharusnya dipahami sebagai upaya mengambil hak dasar seorang warga negara.

Diawasi bersama

Dana BOS adalah milik bersama. Maksudnya, Dana BOS diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat melalui institusi sekolah. Sehingga dana bantuan tersebut pada dasarnya adalah milik murid dan orang tua murid. Hanya saja dikelola oleh sekolah dan diwajibkan untuk tujuan pendidikan.

“Menyadari bahwa Dana BOS adalah milik bersama, maka penggunaannya pun juga harus diawasi bersama,” Ungkap Suroto. “Juknis BOS yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan memberikan ruang untuk melakukan pengawasan oleh orang tua murid melalui media Komite Sekolah,” lanjutnya.

Orang tua murid sebagai pemilik syah dari dana tersebut seharusnya turut serta untuk mengawasi Dana BOS sejak perencanaan Anggaran. Hal tersebut penting untuk memastikan bahwa dana BOS dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan pendidikan anaknya.

“Pengawasan sejak proses perencanaan Dana BOS memungkinkan adanya kontrol terhadap penggunaannya,” ungkap Ana Susi. “keterlibatan sejak perencanaan memungkinkan untuk meminimalisasi dan mengurangi potensi penyelewengan dana BOS dalam penyelenggarannya,” lanjutnya.

Nasib optimalisasi Dana BOS terletak di tangan orang tua murid. Ketika orang tua murid turut serta mengawasi agaknya proses penyelewengan terhadap penggunaan Dana BOS dapat diminimalisir. Alhasil, cita-cita sekolah gratis 9 tahun dapat dengan pelan-pelan diwujudkan di Indonesia. (gm)



Pengawasan Semu Masyarakat dalam Pengelolaan Program BOS



Dana Bantuan Operasional Sekolah, atau sering disebut sebagai BOS, sudah tidak lagi asing di telinga orang tua murid. Bahkan dana bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah sejak tahun 2005 tersebut mungkin telah cukup membantu sebagian orang tua murid. Meski belum mampu membuat mimpi pendidikan gratis menjadi nyata, tetapi setidaknya pendidikan murah merupakan sebuah kondisi yang dapat dicapai.

Tahukah Anda bahwa alokasi Dana BOS tahun 2012 meningkat 5 kali lipat dibandingkan tahun 2005? Selain karena didorong oleh meningkatnya jumlah murid yang dibantu, hal tersebut juga merupakan wujud komitmen dari pemerintah untuk mewujudkan pendidikan murah bagi semua. Terhitung pada tahun 2012 sejumlah Rp. 290 triliun dana dikucurkan untuk dana BOS. Jumlah tersebut akan meningkat sejumlah 6,7% pada tahun 2013 atau sebesar Rp. 331,8 triliun rupiah. Sebuah dana yang cukup besar dan bisa membantu 45 juta murid SD dan SMP di seluruh Indonesia. Tentunya, sejumlah dana tersebut dapat dikucurkan dan berkontribusi terhadap akses pendidikan yang berkualitas dan lebih baik.

Besarnya dana BOS tentunya merupakan pekerjaan rumah tersendiri bagi pengelola Dana BOS. Selain berusaha untuk mendorong agar dana tersebut dapat optimal digunakan dan dimanfaatkan oleh sekolah demi pendidikan peserta didik. Hal lain yang harus juga diperhatikan adalah potensi penyelewengan dan korupsi di sela-sela penggunaan dana BOS. Kecurigaan tersebut tampaknya bukan tanpa alasan karena potensi korupsi akan selalu ada jika sistem yang digunakan berpotensi untuk diselewengkan.

Menyikapi berbagai potensi korupsi yang mungkin terjadi, pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terus berupaya untuk melakukan revisi dan pembenahan terhadap sistem pengelolaan dana BOS. Setidaknya upaya tersebut mulai dilakukan pada awal 2012 dengan menyalurkan dana BOS langsung kepada sekolah. Terobosan tersebut bukannya tanpa resiko, setiap upaya pencegahan terhadap korupsi yang dilakukan pemerintah selalu saja muncul ruang penyelewengan oleh para oknum pengelolaan dana BOS.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan menangkal potensi penyelewengan dana BOS dapat dilakukan dengan mendorong partisipasi aktif orang tua murid. Partisipasi aktif Orang Tua Murid terutama Komite Sekolah diberikan ruang oleh Mendikbud terutama dalam Peraturan Menteri no. 51 tahun 2011.

Secara eksplisit orang tua murid melalui Komite Sekolah diberikan ruang untuk melakukan pengawasan dan terlibat langsung di dalam pengelolaan dana BOS. Ketika orang tua murid terlibat penuh dalam pengelolaan Dana BOS, maka potensi-potensi penyelewengan dapat dikurangi melalui model-model pengawasan bersama.

Model pengawasan bersama akan mengurangi potensi pihak pengelola Dana BOS untuk melakukan penyelewengan. Berbagai data yang disajikan di dalam laporan atau potensi manipulasi dapat diidentifikasi dan ditelisik bersama oleh para anggota Komite Sekolah yang terlibat di dalamnya. Yayasan Satu Karsa Karya berdasarkan research assessment yang dilakukan sejak bulan juli 2012, menemukan beberapa modus penyelewengan yang berpotensi dilakukan oleh pengelola bos di tingkat sekolah. Berbagai potensi tersebut dapat secara spesifik dilihat di dalam Kotak 1.

Kotak 1.

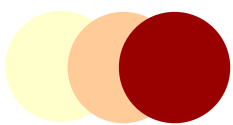
Modus-modus Penyelewengan Implementasi Dana BOS:

- Belum menyusun dan mengesahkan APBS sebelum membelanjakan dana BOS.
- Tidak mencantumkan seluruh penerimaan dana BOS dalam RAPBS.
- Tim Manajemen BOS kurang transparan dalam mengelola dana sekolah.
- Manipulasi SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Dana BOS, dalam cara penyusunan dan mekanisme pengesahan dari APBS menjadi APBS. Padahal salah satu media perencanaan yang dipakai sekolah dalam pengelolaan keuangannya adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
- Sekolah tidak menggratiskan biaya operasional sekolah pada siswa didiknya (belum membebaskan biaya/iuran bagi siswa tidak mampu di sekolah dan tetap memungut iuran/biaya pendidikan seperti iuran ekstrakurikuler, sumbangan pengembangan sekolah, dan iuran komputer kepada siswa).
- Digunakan atau dibelanjakan tidak sesuai petunjuk teknis, dan bukti kwitansi yang tidak realistis.
- Penggelembungan data siswa.

Pernyataannya kemudian, ketika potensi penyelewengan tersebut sudah terlihat dan teridentifikasi. Kemudian sejauhmana Komite Sekolah dapat mengawasi? Apakah komite sekolah memiliki ruang-ruang untuk terlibat sehingga penyelewengan dapat dikurangi?

Selain Juknis mengenai penggunaan Dana BOS, juga terdapat peraturan lainnya yaitu Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Kepmen tersebut menguatkan posisi Komite Sekolah sebagai ujung tombak dan lidah penyalur kepentingan orang tua murid. Selain berfungsi sebagai jembatan kepentingan orang tua murid, Komite Sekolah juga berfungsi sebagai media komunikasi kepentingan antara pihak sekolah.

Bahkan secara spesifik di dalam Juknis yang tertuang dalam Peraturan Menteri no. 51 tahun 2011. Pemerintah memberikan ruang kekuasaan kepada Komite Sekolah untuk terlibat di dalam pengambilan keputusan, memonitoring pengelolaan hingga harus menyetujui Laporan penggunaan Dana BOS yang dikelola oleh Panitia BOS sekolah. Secara lebih spesifik wewenang tersebut dapat dilihat di dalam Kotak 2.



Kotak. 2.

Ruang Partisipasi Masyarakat Melalui Komite Sekolah dalam Pengawasan Dana BOS

- Komite Sekolah terlibat dalam pengelolaan Dana BOS
- Terdapat 1 perwakilan orangtua murid di luar Komite Sekolah yang masuk dalam Manajemen Tim BOS terlibat dalam pengelolaan oleh Komite Sekolah.
- Orangtua berhak mendapatkan sosialisasi program, informasi, mendapatkan layanan pengaduan.
- Melalui Komite Sekolah mengetahui Pembelian Barang.
- Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta).
- Adanya struktur Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam struktur Tim Pelaksana BOS
- Sekolah yang tidak menyelenggarakan Dana BOS harus disetujui orangtua murid melalui Komite Sekolah.

Peraturan pemerintah dan sistem perundangan setidaknya sudah memberikan ruang yang cukup luas bagi orang tua murid terutama Komite Sekolah untuk turut serta dalam mengawasi penggunaan Dana BOS. Permasalahannya kemudian, apakah orang tua murid memiliki cukup nyali dan kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap pihak sekolah. Hal tersebut dikarenakan orang tua murid seringkali berada di dalam posisi lemah ketika dihadapkan dengan Pihak Sekolah.

Sebuah kisah yang ditemukan oleh YSKK menarik untuk dijadikan contoh kasus. Salah seorang ibu, sebut saja Ibu AM, mengkritik salah satu pungutan yang dilakukan sekolah. Menurutnya, pungutan yang dilakukan tersebut tidak jelas rinciannya. Karena bingung akan mengadu kemana, maka dia melaporkannya ke Indonesian Corruption Watch (ICW). Kemudian sebagai penerima laporan, ICW menindaklanjuti memberikan surat peringatan kepada sekolah tersebut.

Bukannya Kepala Sekolah terbuka untuk menjelaskan. Tetapi malahan sebaliknya, Kepala Sekolah mengumpulkan semua orang tua/wali murid untuk dimarahi. Tak terhenti disitu, pihak sekolah berusaha mencari tahu siapa yang mengadu. Akibatkan anak dari yang terduga mengadu malahan dideskreditkan di ruang kelas oleh para guru dan Kepala Sekolah.

Contoh kasus yang ditemukan oleh YSKK agaknya menarik untuk digarisbawahi. Pengawasan yang dilakukan oleh Komite Sekolah atau orang tua murid tidak hanya membutuhkan ruang dan dukungan kebijakan semata. Tetapi terlebih lagi membutuhkan kapasitas serta keberanian orang tua murid untuk melakukannya. Berbagai upaya untuk melakukan pengawasan haruslah didasarkan strategi yang cerdas dan sinergi agar dapat mencapai tujuan utamanya, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS di sekolah. Kedua aspek tersebut tak lain ditujukan demi pemenuhan Hak Dasar warga negara terutamanya di bidang pendidikan.



Secercah Harapan Di Gedung DPR



Upaya untuk mendorong perubahan dalam Petunjuk Teknis penggunaan Dana BOS, dilakukan oleh Yayasan Satu Karsa Karya dengan mendorong ide perubahan kepada anggota DPR-RI. Pilihan tersebut agaknya paling memungkinkan mengingat DPR-RI terutama komisi X memiliki pengaruh dan kemampuan untuk mendorong perubahan kebijakan di tingkat kementerian Pendidikan.

Praktisnya, upaya tersebut dilakukan dengan menemui satu per satu anggota dewan dari Komisi X terutama dari Dapil Jawa Tengah 5 dan DIY. Harapannya dari pertemuan-pertemuan tersebut anggota DPR memberikan dukungan terhadap ide yang ditelorkan oleh YSKK bersama dengan berbagai LSM lokal di Yogyakarta dan Surakarta.

“Kami nekat datang ke DPR-RI dengan tanpa ada siapapun yang kami kenal, prinsip kami DPR adalah rumah rakyat yang seharusnya ramah kepada rakyatnya,” kisah Eka, Program Officer YSKK.

Meski terkesan nekat, upaya YSKK harus dimaknai sebagai strategi untuk mempertanyakan kembali gedung MPR-DPR sebagai rumah rakyat. “ternyata meski dianggap rumah rakyat, ternyata tidak mudah menjumpai wakil rakyat di rumah rakyat,” lanjut Eka setelah berjuang seharian mencari anggota Dewan Komisi X. Melihat paparan Eka, agaknya kesan DPR sebagai rumah rakyat sekali lagi harus dipertanyakan. Meski dianggap rumah rakyat, tidak semua rakyat bisa datang ke gedung rakyat dan menemui wakilnya.

“Berekal dari kontak seorang kawan lama YSKK, saya dikenalkan dengan salah seorang Tenaga Ahli dari Komisi IX,” kisah Eka. Pertemuan Eka dengan Nita, Tenaga Ahli DPR Sri Rahayu (Komisi IX-Fraksi PDIP), dapat menghantarkan perkenalan dengan beberapa orang lainnya. Tersebutlah Citra Tenaga Ahli anggota DPR RI Reni Marlinawati (Komisi X DPR RI), Arum Tenaga Ahli anggota DPR RI Rinto Subekti (Komisi X DPR RI), dan Banteng Tenaga Ahli anggota DPR RI Utut Adianto (Komisi X DPR RI). “Berekal kontak 1 orang, kami bisa mengenal banyak Tenaga Ahli lainnya,” lanjut kisah Eka.



“Meskipun banyak kontak, tidak sebanding dengan anggota DPR yang dapat ditemui dan memberikan komentar terhadap masukan kami,” imbuah Ana Susi, Program Manager YSKK. “Hanya Pak Utut Ardianto, yang bersedia menemui dan berbicara dengan kami,” lanjutnya.

Lagi-lagi kekecewaan didapat oleh Tim YSKK. “setelah seperempat hari kita menunggu, Pak utut hanya memberikan waktu 15 menit berdiskusi,” kisah Eka dan Susi setelah lebih dari setengah hari menunggu di ruang rapat Komisi X di gedung Nusantara II, senayan.

Ternyata kekecewaan tak berhenti disana. Nada halus bernuansa penolakan juga dilemparkan dari anggota DPR yang ditemui. “... trus maunya apa.... dan rekomendasi yang langsung saja...khan para LSM ini orang-orang pintar “ begitu ungkap Utut Ardianto, setelah bertemu dengan Tim Advokasi dari YSKK. “Respon Pak Utut menjadi pertimbangan tersendiri yang mempengaruhi strategi advokasi kami,” kisah Ana Susi. Ungkapan tersebut menunjukkan stereotype dari Anggota DPR yang cenderung meminta rekomendasi praktis tanpa kemudian memikirkan aspek ideologis dan alasan pembenar di belakangnya. Lebih lanjut, fakta tersebut menunjukkan bahwa anggota DPR cenderung meminta usulan praktis tanpa harus berpikir lebih dalam lagi.

Cerita dari kawan-kawan YSKK menunjukkan betapa sulitnya proses Advokasi di DPR. Kedekatan personal menjadi faktor penting dalam proses advokasi. Lagi-lagi hal tersebut menunjukkan proses partisipasi publik formal masih belum berjalan. Alhasil, kedekatan pribadi menjadi lebih dominan dan lebih didengarkan oleh Anggota DPR. (asy-eka-gm)

Kisah



FGD (Focus Group Discussion) dengan Jurnalis/Media dan CSO di Kabupaten Gunungkidul



FGD (Focus Group Discussion) di Dinas Pendidikan, Solo

Sulitnya Memperoleh Data Program BOS

Program BOS merupakan isu yang sangat sensitif bagi yang terkait. Beberapa pengalaman YSKK dalam melakukan *research assesment* dan *case studies* tentang program BOS. Proses awal kami membangun kerja sama dengan CSO yang mempunyai pengalaman dalam hal tersebut. Dalam memetakan bentuk dan modus penyelewengan dana BOS banyak yang bisa kita gunakan sebagai acuan atau referensi tetapi dalam monitoringnya belum ada.

Proses yang menjadi tantangan ketika berhadapan dengan dinas pendidikan dan olah raga. Studi kasus kami di 2 wilayah yaitu di kabupaten Gunungkidul dan Kota Surakarta. Untuk di kabupaten Gunungkidul tidak menjadi hambatan karena kooperatifnya kepala Dinas terhadap rencana penelitian yang dilakukan oleh YSKK. Teman-teman peneliti mendapatkan legalitas dari Dikpora setempat untuk melakukan penelitian. Bahkan, YSKK juga diberikan kebebasan memilih sekolah yang dijadikan sampel. Teman-teman media juga dapat terlibat. Bagi saya pribadi semua jempol saya tunjukkan sebagai wujud apresiasi kepada Dikpora Kabupaten Gunungkidul khususnya.

Tetapi untuk di kota Solo akan lain ceritanya. YSKK mengirim surat permohonan rekomendasi untuk melakukan penelitian saja sampai 3 kali belum mendapatkan titik yang cerah. Sampai akhirnya kami pendekatan ekstra kepada manajemen BOS Kota Surakarta dan diberikan ruang untuk FGD dengan pihak-pihak terkait tetapi memang stakeholdernya dipikirkan oleh Dikpora setempat.



www.awasibos.org
blog.awasibos.org



Awasi Dana BOS



Untuk Pendidikan Yang Lebih Baik

Sekolah Online, Belajar Advokasi Lintas Batas

Inisiatif pengawasan BOS banyak dilakukan oleh banyak CSO dan NGO di Indonesia. Tetapi tidak kesemuanya meninggalkan proses pembelajaran yang dapat ditularkan oleh kepada berbagai organisasi masyarakat sipil lainnya. Alhasil, terobosan di suatu daerah tidak dapat direplikasi dan dikembangkan di daerah lainnya. Jarak dan waktu seringkali menjadi batas ketiadaan proses pembelajaran tersebut.

“Melalui Sekolah Online, YSKK berusaha untuk meretas batas proses pembelajaran,” ungkap Ana Susi, Program Manager di Yayasan Satu Karsa Karya Solo.

Sekolah Online yang mengambil tema secara spesifik mengenai pendidikan sebagai hak dasar akan dimulai pada minggu kedua bulan Desember. Sekolah Online tersebut merupakan upaya untuk mengenalkan proses pembelajaran mengenai kegiatan pengawasan pendidikan melalui media internet.

Bagi penggiat yang tertarik untuk bergabung dalam kegiatan pembelajaran online dapat mengirimkan mengunjungi situs www.awasibos.org atau <http://education.awasibos.org>. Informasi mengenai pendaftaran dapat diunduh di kedua situs tersebut.

“Proses pembelajarannya interaktif dan mengedepankan sharing antara individu penggiatnya” lanjut Ana Susi. Peluang tersebut memungkinkan proses pembelajaran melalui sekolah online dapat berorientasi untuk sharing dan berbagi pengalaman selain berupaya mendorong pembelajaran bersama.

Melek teknologi agaknya menjadi prasyarat utama dalam proses pembelajaran online selain tentunya kemudahan akses internet. Karena proses pembelajaran sepenuhnya mengandalkan proses diskusi dan pembelajaran bersama dari para pesertanya di dunia maya. (gm)

Workshop Lanjutan

Pengembangan Model Pengawasan Dana BOS



Terhitung sejak Juli 2012, YSKK telah memulai langkah awal untuk mengembangkan model pengawasan dana BOS berbasis masyarakat. Model tersebut merupakan strategi untuk mendorong penguatan prinsip partisipasi publik di dalam pengelolaan dana BOS. Setelah melalui proses selama beberapa bulan dalam bentuk penelitian dan uji akses, YSKK melaksanakan workshop finalisasi model pengawasan bos berbasis masyarakat pada 2-3 agustus di University Hotel, Yogyakarta.

“Workshop dihadiri oleh para stakeholder pendidikan di kota Yogyakarta dan Surakarta,” ungkap Suroto, Direktur YSKK. Tak pelak stakeholder dari Komite Sekolah di Kota Surakarta, Kepala Dinas Pendidikan dari Kabupaten Gunung Kidul dan perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta turut serta meramaikan kegiatan acara tersebut.

“Proses workshop sangat menarik, bahkan dari pihak dinas cukup terbuka untuk bercerita bagaimana potensi penggelapan yang terjadi dalam implementasi dana BOS,” lanjut Suroto.

Kegiatan yang difasilitasi oleh Agus Mulyono, anggota Jaringan Masyarakat Peduli Pelayanan Publik Jakarta tersebut berhasil memetakan titik-titik rawan dalam pengelolaan Dana BOS. Bahkan, rumusan mengenai strategi partisipasi yang lebih luas berhasil ditelorkan selama proses dua hari 1 malam tersebut. Tak hanya berkulat mengenai konsep, tetapi proses tersebut juga berhasil merumuskan berbagai rumusan spesifik perubahan juknis pengelolaan dana BOS 2012.

Informasi mendetail mengenai rumusan perubahan juknis dana BOS akan diberberkan secara mendetail di dalam website www.awasibos.org. (gm)

Indonesia (boleh) Mengadu

Permasalahan mengenai Dana BOS cukup banyak terjadi. Namun, seringkali tidak ada ruang yang cukup untuk melakukan pengaduan. Setidaknya di dalam sekolah, aduan mengenai kecurigaan penggunaan Dana BOS oleh orang tua murid dikhawatirkan akan mempengaruhi nilai hasil belajar anak didik. Alhasil, orang tua murid yang akan mengadukan potensi penyelewengan ragu dan tidak mau mengadukan hal tersebut.

Menyikapi minimnya ruang-ruang pengaduan tersebut, Yayasan Satu Karsa Karya mencoba membangun ruang Aduan berbasis online. Media aduan tersebut diberi tajuk “Indonesia Mengadu”. Pilihan berbasis online agaknya menjadi salah satu alternatif untuk melindungi pelapor.

“Aduan di Indonesia mengadu akan kami salurkan melalui beberapa pihak mulai dari mitra-mitra YSKK yang mampu mengadvokasi dana BOS, stakeholder tingkat Provinsi dan Kota melalui Dinas Pendidikan, hingga mitra-mitra kami di Parlemen Daerah maupun Nasional,” Ungkap Suroto, Direktur YSKK surakarta.

Akses untuk aduan dapat di klik www.awasibos.org kemudian dipilih logo Indonesia mengadu di sebelah kanan. Logo tersebut kemudian akan mengarahkan calon pengadu pada form yang harus diisi. Segala data pribadi yang dimunculkan diberikan di dalam aduan bersifat rahasia dan tidak akan dibuka kepada siapapun.

Terobosan yang dilakukan oleh YSKK agaknya merupakan salah satu alternatif dalam proses pelaporan Dana BOS oleh masyarakat. Para pelapor dapat terjamin identitas pribadinya sehingga potensi-potensi ancaman yang mungkin muncul dapat diminimalisir. (gm)